



Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Annie Mustika Putri^{1*)}, Linda Hetri Suriyanti², dan Intan Diane Binangkit³

^{1,2}Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia

³Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia

*) email: annemustika@umri.ac.id

Article Info

Article history:

Received: November 2018

Accepted: November 2018

Published: December 2018

Keywords:

Government Accounting Standards

Implementation, Human Resource Competence,

Quality of Local

Government Finance

Report

JELClassification: G0, N2

Abstract

This research aims to test the influence of directly and indirectly the independent variables of the application of government accounting standards, competencies of human resources, dependent variable quality of local government financial reports. The data used in this research is the primary data that comes from the dissemination of questionnaires to officials administering finance in a work unit (SKPD) area of the device in the city of Pekanbaru, Kampar and Rokan Hilir. This study used linear regression analysis SPSS v.17. The results showed that implementation of the Government Accounting Standards Implementation and the Human Resources Competence have positive and significant effect to the Quality of the Financial Report of Local Government.

Tujuan dari penelitian ini untuk melihat pengaruh hubungan langsung variable independen penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, variable dependen yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berasal dari penyebaran kuesioner kepada pejabat penatausahaan keuangan di satuan kerja perangkat daerah di Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Rokan Hilir. Analisis data penelitian adalah analisis regresi linier berganda menggunakan SPSS v.17. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Laporan keuangan pemerintah disajikan sebagai wujud pertanggungjawaban setiap entitas pelaporan yang meliputi laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan kementerian negara/lembaga, dan laporan keuangan pemerintah daerah (Bastian, 2010). Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan akuntabilitas (Darise, 2008).

Laporan keuangan yang berkualitas menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 adalah laporan keuangan yang memiliki karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat tercermin dari hasil pemeriksaan BPK. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan (Ratifah & Ridwan, 2012). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Rahayu, 2014). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas (Rahayu, 2014).

Masih sedikitnya LKPD yang memperoleh opini WTP di Indonesia menjadi suatu fenomena penting untuk dianalisis. Dua tahun belakangan ini dan diprediksi bakal terjadi ke depan, euforia untuk memperoleh opini WTP dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi isu yang santer di kalangan Bupati, Walikota, Gubernur, dan Menteri bahkan sampai Presiden. Ini semua terkait dengan target pemerintah, bahwa pada tahun 2015 opini WTP harus mencapai 60% (Gutomo, 2014).

Permasalahan yang menghambat belum diperolehnya opini WTP beragam. Khusus terhadap LKPD, masih terkait dengan pengelolaan kas, persediaan, investasi permanen dan nonpermanen, serta secara mayoritas disebabkan karena pengelolaan aset tetap yang belum akuntabel. Permasalahan aset tetap Pemerintah Daerah pada umumnya terkait adanya barang milik daerah (BMD) tidak dicatat, BMD yang tidak ada justru masih dicatat, BMD dicatat tapi tidak didukung dengan dokumen kepemilikan yang sah. Kelemahan sistemik merupakan bawaan dari masa lalu yang memposisikan pengelolaan BMD tidak lebih penting dibanding pengelolaan uang. Penyebab lainnya karena pola pikir pelaku yang lebih hobi membeli daripada memelihara. Kondisi ini berlangsung bertahun-tahun terakumulasi sehingga menjadi permasalahan kronis yang harus segera ditangani oleh Kepala Daerah supaya bisa ikut andil dalam perburuan opini WTP (Gutomo, 2014).

Provinsi Riau memiliki 10 kabupaten dan 2 kota, dimana ada 5 (lima) kabupaten/kota yang mendapatkan hasil pemeriksaan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2015 yaitu; Pekanbaru, Indragiri Hulu, Rokan Hilir, Kampar, dan Dumai. Tapi disini peneliti mengambil populasi yaitu 3 kabupaten/Kota dengan APBD terbesar. Adapun 3 Kabupaten/Kota dengan APBD terbesar untuk tahun 2015 yaitu Pekanbaru, Rokan Hilir, dan Kampar. Karena, dengan mengelola dana yang lebih besar, tentu akan lebih besar juga resiko dalam penggunaan dana APBD tersebut. Jadi bagaimana SKPD pada Kabupaten/Kota dapat mengelola dana tersebut dengan baik. Opini WDP ini bukan merupakan suatu hasil yang maksimal serta mengindikasikan bahwa masih banyak kelemahan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan daerah yang perlu diperbaiki (Indriasih, 2014).

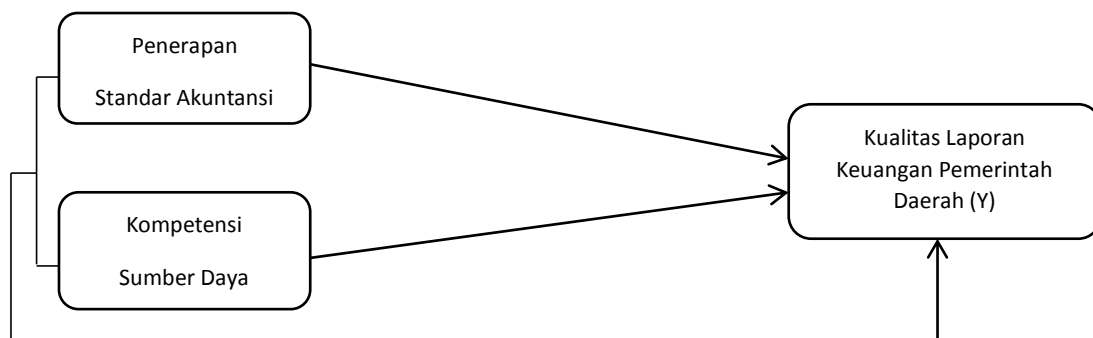
Dari hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Riau atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2014 pada semester I tahun 2015 pada Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Rokan Hilir permasalahan yang didapati yaitu, Aset tetap Pemerintah Kota Pekanbaru pada Neraca per 31 Desember 2014 belum

disajikan secara lengkap dan akurat; dan Tanah Hak Pengelolaan (HPL) belum tercatat pada Neraca Kota Pekanbaru. Selisih Lebih Penyajian Nilai Aset Tetap per 1 Januari 2014 Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar TA 2014 belum dapat dijelaskan; Nilai aset tetap dan nilai akumulasi penyusutan aset tetap dikecualikan untuk opini yang diberikan atas LKPD Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah, yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah di terima secara umum (Bastian, 2010). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia (Kawedar, 2010; Susilawati & Riana, 2014).

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Kompetensi SDM merupakan variabel penentu dalam meningkatkan kualitas LKPD (Sudiarianti, Ulupui, & Budiasih, 2015). Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Kawedar, 2010).

Berdasarkan penjelasan di atas maka model penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Model Penelitian

Hipotesis yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah:

- H₁ : Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- H₂ : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- H₃ : Penerapan standar akuntansi pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara bersama-sama terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung melalui penyampaian kuesioner kepada responden dengan menyebarkan kuesioner langsung kepada instansi pemerintah daerah yang bersangkutan. Jadi data bersumber dari informasi yang diberikan oleh bagian Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) analisis deskriptif; (2) uji kualitas data yang meliputi: uji validitas dan uji reliabilitas; (3) uji asumsi yang terdiri dari: uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas; (4) uji pengaruh yang meliputi: analisis linear berganda dan analisis koefisien determinasi (R^2); (5) uji hipotesis yang meliputi: uji t (parsial) dan uji f (simultan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai korelasi *Pearson Product Moment* atau r hitung dengan nilai r tabel. Nilai r tabel dengan derajat bebas sebesar $n - 2 = 84 - 2 = 82$ dan pada taraf signifikansi 0,05 (uji 2 sisi) adalah 0,2146. Hasil uji validitas dalam penelitian ini untuk variabel X_1 atau penerapan standar akuntansi pemerintah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
PSAP1	0,624	0,2146	Valid
PSAP2	0,659	0,2146	Valid
PSAP3	0,708	0,2146	Valid
PSAP4	0,594	0,2146	Valid
PSAP5	0,717	0,2146	Valid
PSAP6	0,759	0,2146	Valid
PSAP7	0,718	0,2146	Valid
PSAP8	0,806	0,2146	Valid
PSAP9	0,725	0,2146	Valid
PSAP10	0,906	0,2146	Valid
PSAP11	0,893	0,2146	Valid
PSAP12	0,870	0,2146	Valid
PSAP13	0,817	0,2146	Valid
PSAP14	0,734	0,2146	Valid
PSAP15	0,780	0,2146	Valid
PSAP16	0,726	0,2146	Valid
PSAP17	0,776	0,2146	Valid
PSAP18	0,697	0,2146	Valid
PSAP19	0,712	0,2146	Valid
PSAP20	0,830	0,2146	Valid
PSAP21	0,865	0,2146	Valid
PSAP22	0,790	0,2146	Valid
PSAP23	0,837	0,2146	Valid
PSAP24	0,867	0,2146	Valid
PSAP25	0,784	0,2146	Valid
PSAP26	0,867	0,2146	Valid
PSAP27	0,821	0,2146	Valid
PSAP28	0,806	0,2146	Valid
PSAP29	0,770	0,2146	Valid
PSAP30	0,859	0,2146	Valid
PSAP31	0,901	0,2146	Valid

Sumber: Data Olahan, 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan dalam variabel penerapan standar akuntansi pemerintah sudah valid karena nilai r_{hitung} lebih besar dari nilai r_{tabel} .

Hasil uji validitas dalam penelitian ini untuk variabel X_2 atau kompetensi sumber daya manusia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia

Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
SDM1	0,436	0,2146	Valid
SDM2	0,637	0,2146	Valid
SDM3	0,795	0,2146	Valid
SDM4	0,801	0,2146	Valid
SDM5	0,504	0,2146	Valid
SDM6	0,473	0,2146	Valid
SDM7	0,292	0,2146	Valid
SDM8	0,438	0,2146	Valid
SDM9	0,283	0,2146	Valid
SDM10	0,317	0,2146	Valid
SDM11	0,420	0,2146	Valid
SDM12	0,289	0,2146	Valid
SDM13	0,387	0,2146	Valid
SDM14	0,251	0,2146	Valid
SDM15	0,445	0,2146	Valid
SDM16	0,387	0,2146	Valid
SDM17	0,538	0,2146	Valid
SDM18	0,662	0,2146	Valid
SDM19	0,651	0,2146	Valid
SDM20	0,431	0,2146	Valid

Sumber: Data Olahan, 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan dalam variabel kompetensi sumber daya manusia sudah valid karena nilai r_{hitung} lebih besar dari nilai r_{tabel} .

Hasil uji validitas dalam penelitian ini untuk variabel Y atau kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
LKPD1	0,714	0,2146	Valid
LKPD2	0,542	0,2146	Valid
LKPD3	0,709	0,2146	Valid
LKPD4	0,517	0,2146	Valid
LKPD5	0,529	0,2146	Valid
LKPD6	0,648	0,2146	Valid
LKPD7	0,760	0,2146	Valid
LKPD8	0,472	0,2146	Valid
LKPD9	0,462	0,2146	Valid
LKPD10	0,566	0,2146	Valid
LKPD11	0,357	0,2146	Valid
LKPD12	0,580	0,2146	Valid
LKPD13	0,476	0,2146	Valid
LKPD14	0,640	0,2146	Valid
LKPD15	0,399	0,2146	Valid
LKPD16	0,482	0,2146	Valid

Sumber: Data Olahan, 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan dalam variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sudah valid karena nilai r_{hitung} lebih besar dari nilai r_{tabel} .

Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Pernyataan	Cronbach's Alpha	Standar Cronbach's Alpha	Keterangan
LKPD (Y)	0,849	0,60	Reliabel
PSAP (X ₁)	0,979	0,60	Reliabel
SDM (X ₂)	0,813	0,60	Reliabel

Sumber: Data Olahan, 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian ini sudah reliabel karena nilai *Alpha Cronbach* masing-masing variabel lebih besar dari 0,6.

Hasil Uji Asumsi

Hasil Uji Normalitas

Hasil dengan menggunakan tabel *Kolmogorov-Smirnov* bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		84
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.18062025
Most Extreme Differences	Absolute	.102
	Positive	.102
	Negative	-.066
Kolmogorov-Smirnov Z		.936
Asymp. Sig. (2-tailed)		.345

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data Olahan, 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa hasil *asympt. Sig. (2-tailed)* adalah sebesar 0,073. Maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal karena *asympt. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05.

Hasil Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
PSAP	.650	1.539
SDM	.650	1.539

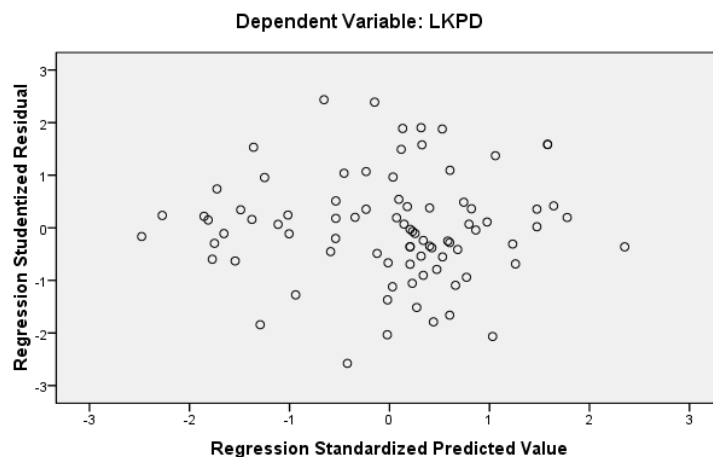
a. Dependent Variable: LKPD

Sumber: Data Olahan, 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai VIF untuk variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) sebesar 1,539 dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2) sebesar 1,539. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel bebas karena nilai VIF lebih kecil dari 10.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dalam uji heteroskedastisitas, suatu model dikatakan memiliki *problem* heteroskedastisitas itu berarti ada atau terdapat varian variabel dalam model yang tidak sama.



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Data Olahan, 2018

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil uji regresli linier berganda dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.584	.235		2.483	.015
PSAP	.242	.056	.313	4.322	.000
SDM	.645	.074	.628	8.682	.000

a. Dependent Variable: LKPD
Sumber: Data Olahan, 2018

Berdasarkan persamaan dan tabel di atas, maka dapat disusun persamaan regresi untuk penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = 0,584 + 0,242 X_1 + 0,645 X_2$$

Persamaan regresi di atas diperoleh dari hasil perhitungan SPSS. Persamaan regresi tersebut memiliki makna:

1. Nilai konstanta sebesar 0,584 memiliki arti bahwa jika variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X₁) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (X₂) memiliki nilai nol, maka variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan memiliki nilai sebesar 0,584.
2. Nilai koefisien regresi untuk variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X₁) adalah positif sebesar 0,242 dan hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X₁), maka semakin tinggi nilai variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jika variabel Penerapan Standar

Akuntansi Pemerintahan (X_1), naik 1 satuan, maka variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan meningkat sebesar 0,242 satuan.

3. Nilai koefisien regresi untuk variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_2) adalah positif sebesar 0,645 dan hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_2), maka semakin tinggi nilai variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jika variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_2) naik 1 satuan, maka variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan meningkat sebesar 0,645.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.851 ^a	.725	.718	.18284	1.812

a. Predictors: (Constant), SDM, PSAP

b. Dependent Variable: LKPD

Sumber: Data Olahan, 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R^2 sebesar 0,718 atau sebesar 71,8%. Hal ini berarti variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat dijelaskan oleh variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebesar 71,8% sedangkan sisanya sebesar 28,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji t

Berdasarkan hasil pengujian parsial dengan uji t pada Tabel , dapat dinyatakan bahwa:

1. Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X_1) memiliki t_{hitung} sebesar 4,322 > t_{tabel} sebesar 1,98969 dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X_1) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).
2. Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki t_{hitung} sebesar 8,682 > t_{tabel} sebesar 1,98969 dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_2 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_2) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

Hasil Uji F

Hasil uji simultan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Hasil Uji Simultan
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7.122	2	3.561	106.523	.000 ^a
	Residual	2.708	81	.033		
	Total	9.830	83			

a. Predictors: (Constant), SDM, PSAP

b. Dependent Variable: LKPD

Sumber: Data Olahan, 2018

Berdasarkan hasil pengujian simultan dengan uji F, didapatkan nilai $F_{hitung} 106,523 > F_{tabel} 3,11$ dengan nilai signifikansi diperoleh $0,000 < 0,05$. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_3 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji-t diperoleh nilai $t_{hitung} 4,322 > t_{tabel} 1,98969$ dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dimana menandakan bahwa hipotesis dalam penelitian ini menerima H_1 dan menolak H_0 . Hasil pengujian terhadap variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X_1) memperoleh nilai koefisien sebesar 0,242. Hasil pengujian ini secara statistik membuktikan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penerapan standar akuntansi pemerintah dalam penyusunan LKPD yang didukung dengan sistem pengendalian intern pemerintah yang kuat akan dapat meningkatkan kualitas LKPD yang dihasilkan. Laporan keuangan akan lebih berkualitas dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah sehingga dapat dijadikan perbandingan kinerja antar kurun waktu dan dengan Pemerintah Daerah lainnya, bagi auditor dengan adanya standar akuntansi pemerintah akan mempermudah proses audit karena pada dasarnya audit adalah memeriksa laporan keuangan yang merupakan asersi manajemen dikaitkan dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan (Evicahyadi, 2016).

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji-t diperoleh nilai $t_{hitung} 8,682 > t_{tabel} 1,98969$ dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kinerja dimana menandakan bahwa hipotesis dalam penelitian ini menerima H_2 dan menolak H_0 . Hasil pengujian terhadap variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_2) memperoleh nilai koefisien sebesar 0,645. Hasil pengujian ini secara statistik membuktikan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan tingkat variasi kompetensi sumber daya manusia dalam menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah dapat semakin meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dijelaskan karena dengan Kompetensi sumber daya manusia dalam menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah, maka kesalahan dalam hal pencatatan atau penilaian aset dapat terdeteksi sejak awal periode akuntansi sehingga dapat meminimalisir kekeliruan pencatatan, penyimpangan maupun faktor ketidakpatuhan terhadap peraturan. Efektifitas sistem pengendalian intern pemerintah menjadi tanggungjawab manajemen dan merupakan aspek fundamental untuk keberhasilan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel (Syarifudin, 2014).

Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang baik disamping dapat mempengaruhi kualitas LKPD secara langsung, juga dapat meningkatkan sistem pengendalian intern pemerintah pada instansinya yang berimplikasi pula pada peningkatan kualitas laporan keuangan SKPD. Sistem pengendalian intern yang dijalankan oleh PPK-SKPD yang memiliki kompetensi mampu menghasilkan LKPD yang memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat diperbandingkan dan dapat dipahami. Kompetensi sumber daya manusia yang tinggi dalam menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah yang baik dan optimal, akan mampu

meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Sistem pengendalian intern pemerintah yang dijalankan oleh PPK-SKPD yang memiliki kompetensi mampu menghasilkan LKPD yang memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat diperbandingkan dan dapat dipahami (Sudiarianti et al., 2015).

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji F, diperoleh nilai F_{hitung} dari Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebesar $106,523 > F_{tabel} 3,11$, nilai signifikansi diperoleh $0,000 < \alpha 0,05$ menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dimana menandakan bahwa hipotesis dalam penelitian ini menerima H_3 dan menolak H_0 . Hasil pengujian terhadap variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X_1) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_2) memperoleh nilai Adjusted R^2 sebesar 0,718 atau sebesar 71,8%. Hasil pengujian ini secara statistik membuktikan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 71,8% dan sisanya 28,2% merupakan faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia merupakan dua faktor yang dapat secara bersama-sama memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dibuat beberapa kesimpulan yakni: (1) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; (2) Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; (3) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

SARAN

Beberapa saran yang dapat diberikan terkait penelitian ini adalah: 1) Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah obyek penelitian, yaitu menambah beberapa daerah penelitian sehingga seluruh SKPD kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Riau bisa diteliti. Penelitian ini hanya mengambil 1 (satu) orang responden, yaitu hanya Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD); 2) Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah responden pada bagian keuangan. Melengkapi metode survei dengan wawancara untuk meningkatkan sikap kepedulian dan keseriusan responden dalam menjawab semua pertanyaan yang disediakan dan untuk mengurangi subjektivitas dari responden serta melihat konsistensi terhadap hasil jawaban jika dilakukan metode wawancara. Menambah jumlah variabel bebas lainnya yang diprediksi berpotensi mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Kepegawaian Negara. (2003). Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Darise, N. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Indeks.

- Evicahyadi, S. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 5(3), 403–428.
- Gutomo, K. (2014). Berburu Opini WTP. *Bpkp.Go.Id*. Retrieved from <http://www.bpkp.go.id/jateng/konten/1910/Berburu-Opini-WTP.bpkp>
- Indriasih, D. (2014). The Effect of Government Apparatus Competence and the Effectiveness of Government Internal Control toward the Quality of Financial Reporting in Local Government. *Research Journal of Finance and Accounting*, 5(20).
- Kawedar, W. (2010). Opini Audit dan Sistem Pengendalian Intern (Studi Kasus di Kabupaten PWJ yang Mengalami Penurunan Opini Audit). *Universitas Diponegoro Semarang*.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Rahayu, L. (2014). Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAKD, dan Penerapan SAP terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Provinsi Riau. *JOM Fekon*, 1(2).
- Ratifah, I., & Ridwan, M. (2012). Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Trikonomika*, 11(1), 29–39.
- Sudiarianti, N. M., Ulupui, I. G. K. A., & Budiasih, I. G. A. (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah serta Implikasinya pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi XVIII*.
- Susilawati, S., & Riana, D. S. (2014). Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern sebagai Antecedent Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *STAR, Study & Accounting Research*, XI (1).
- Syarifudin, A. (2014). Pengaruh SDM dan Peran Audit Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Studi Empiris pada Pemkab Kebumen). *Fokus Bisnis*, 14(02).